



KLARIFIKASI DALAM MENENTUKAN PESERTA PEMILIH UNTUK MEMBANTU PETUGAS PANTARLIH DALAM MENENTUKAN HAK PEMILIH DALAM PEMILU 2024

Oleh:

Edy Widodo¹, Sifa Fauziah², Sufajar Butsianto³, Andriani⁴, Aswan Supriyadi Sunge⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Pelita Bangsa

E-mail: ¹ewidodo@pelitabangsa.ac.id, ²sifa.fauziah@pelitabangsa.ac.id,

³sufajar@pelitabangsa.ac.id, ⁴andriani@pelitabangsa.ac.id,

⁵aswan_sunge@pelitabangsa.ac.id

Article History:

Received: 15-06-2023

Revised: 19-07-2023

Accepted: 22-07-2023

Keywords:

PKM, citizen data, KTP and
Family Card

Abstract: In the current digital era, the general public does not yet understand the term digitization, therefore the government, in seeking correct and valid data, collects citizen data according to KTPs and residences manually. Then valid data will later be used as a potential voter in the 2024 PEMILU. Therefore the government formed a committee to record all local residents according to their KTPs and residences called PANTARLIH officers (Voters Data Updating Officers) who are the spearhead of the KPU in updating and registering voters. The data collection includes age, having an ID card, family card, all of this is recorded according to the local address, so that the voters' data will be truly local residents. The results of this data will become valid voter data in the 2024 election era.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan suatu proses untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dimana dalam pelaksanaannya, rakyat bebas untuk memilih calon pemimpin untuk memajukan Negaranya. Pengertian pemilihan umum juga ditegaskan dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017, bahwa Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kedaulatan rakyat tersebut adalah pertama, bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis. Kedua Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur, adil dan hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum. Konsep demokrasi, bahwa kekuasaan harus berasal dari rakyat dilaksanakan oleh dan untuk rakyat. Berangkat dari gagasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilihan umum adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang berikutnya dijadikan sebagai serpihan dari hak asasi setiap warga negara.

1. Pemilihan umum adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah



satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis.

Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.

2. Pemilihan Umum merupakan proses pemilihan orang-orang atau wakil untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Menurut teori demokrasi klasik pemilu merupakan suatu Transmission of Belt sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat beralih menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat.
3. Pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala merupakan kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang akan melahirkan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Sebab melalui proses inilah akan dihasilkan pemerintahan yang didukung oleh rakyat, sekaligus menentukan asas legalitas, legitimasi dan asas kredibilitas.

Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Makna demokrasi berkaitan erat dengan sistem sosial pendukungnya dan sistem politik atau rezim yang menggunakannya. Disamping mengandung unsur-unsur yang universal (common denominator), demokrasi juga mengandung muatan-muatan kontekstual yang melekat pada sistem sosial dan sistem politik tertentu (cultural relativism). Demokrasi erat kaitannya dengan sistem sosial tertentu karena demokrasi tidak hanya sekedar merujuk pada mesin politik (political machinery), tetapi juga mengandung pandangan hidup (way of living) suatu masyarakat. Pelaksanaan demokrasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik (public policy) yang banyak ditentukan para pemimpin (elite) organisasi politik dan kelompok kepentingan (interest group) yang tampil secara kompetitif. Bahkan, negara yang paling otoriter sekalipun akan menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi.

METODE

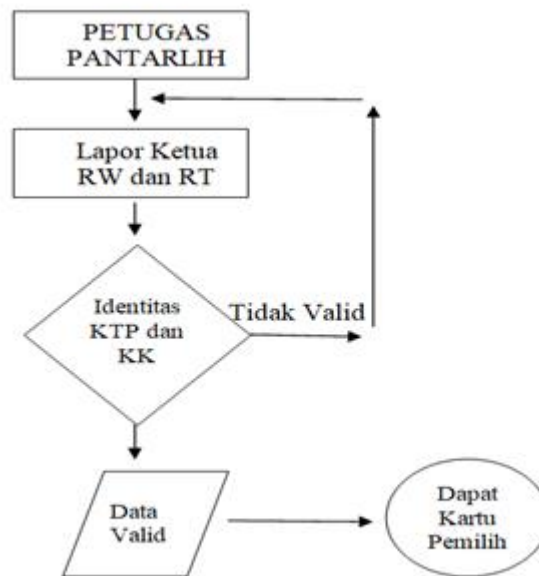
Dalam melaksanakan tugas Pantarlih mendatangi rumah Pemilih untuk menentukan dapat yang valid dan data tidak valid. Hal ini dengan cara pengelompokan data yaitu Jumlah Pemilih Aktif, Jumlah Pemilih tidak memenuhi syarat, Jumlah pemilih baru, Jumlah Pemilih Perbaikan Data dan Jumlah pemilih Non e-KTP. Untuk melaksanakan tersebut petugas PANTARLIH dengan tata cara berikut:

- a. Selalu memakai tanda pengenalan Pantarlih.
- b. Menyapa Pemilih dengan ramah dan santun.
- c. Memperkenalkan identitas Pantarlih.
- d. Meminta waktu dan kesediaan Pemilih dalam pelaksanaan Coklit.
- e. Membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah yang terdaftar formulir Model A-Daftar Pemilih.
- f. Meminta kepala keluarga atau anggota keluarga untuk menunjukkan KTP-el atau Kartu Keluarga.
- g. Pantarlih meneliti dan mencocokkan data Pemilih yang tertera pada KTP-el atau Kartu



Keluarga dengan data pada formulir Model A-Daftar Pemilih.

- h. Jika terdapat anggota keluarga yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pada KTP-el, maka Pantarlih menyampaikan kepada keluarga untuk mengingatkan Pemilih tersebut untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT.



HASIL

Secara umum kegiatan pengabdian ini berjalan lancar, dimulai dari kegiatan survey pendahuluan, pelaksanaan kegiatan pegabdian, sampai kepada penyusunan laporan. Berdasarkan diskusi yang diselenggarakan diperoleh kesimpulan bahwa para peserta pengabdian tersebut merasa senang dan puas.

Hal ini terbukti dengan adanya permintaan dari para peserta agar kegiatan pengabdian ini tidak hanya diselenggarakan satu kali tetap harus berkelanjutan, mengingat pentingnya pembelajaran dan pengenalan Jaringan komputer yang semakin meluas. Melalui pengabdian yang berkelanjutan akan terjalin hubungan kerjasama antara dosen-dosen di Program Studi Teknik Informatika dengan pihak kelurahan Cimuning - Bekasi. Hubungan kerjasama dalam hal pengembangan metode penghitungan data yang baik dan benar , sehingga program pengabdian masyarakat dapat berjalan maksimal, yang menjadi salah satu kewajiban civitas akademika universitas Pelita bangsa.

Tingginya antusiasme dari pihak kelurahan Cimuning yang memang sangat terbuka agar UPB dan pihak keluarahan dapat lebih banyak lagi bersosialisasi dibidang pengolahan data, semoga dapat berlanjut dengan berbagai pengabdian masyarakat lainnya.

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pengabdian sehingga dapat terlaksana dengan lancar sebagai berikut:

- a. Tingginya antusiasme peserta pengabdian yaitu RT, RW dan pihak kelurahan serta segenap manajemen yang menyatakan sangat puas ..



- b. Manfaat yang besar atas tema pengabdian mengenai metode pemrosesan data di lingkungan kelurahan Cimuning termasuk lingkungan RT dan RW setempat
- c. Fasilitas dan semangat tim pengabdian yang mendukung kelancaran pengabdian.
- d. Selain faktor pendukung, ada pula faktor penghambat yang mengakibatkan kegiatan pengabdian ini tidak mampu mencapai tujuan secara maksimal, yaitu: waktu pengabdian hanya 2 hari mengakibatkan peserta kelelahan dilatih sejak jam 08.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB.
- e. Koordinasi antar peserta pengabdian yang dilaksanakan di lingkungan kelurahan Cimuning yang meliputi 19 RW belum bisa berjalan dengan sempurna karena perbedaan kegiatan dan kepentingan masing-masing untuk memiliki hari yang sama untuk mengikuti kegiatan pengabdian, semoga kedepannya dapat dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat berikutnya dan berkelanjutan.

Tabel.1 Hasil suara Pemilih

DATA PEMILIH DI KELUARAHAN CIMUNING

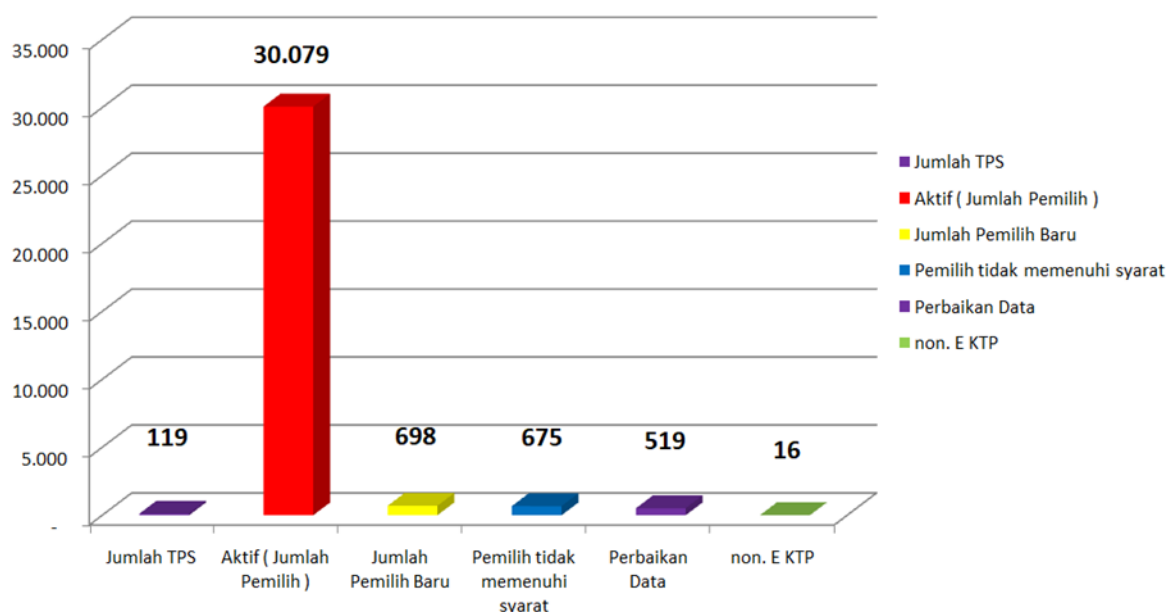
No.	Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih				
			Aktif	Baru	Tidak memenuhi syarat	Perbaikan Data	Non e-KTP
1.	Cimuning	119	30.079	698	675	519	16

Total Pemilih seharusnya = 31.273

Total Pemilih tidak Valid = 675

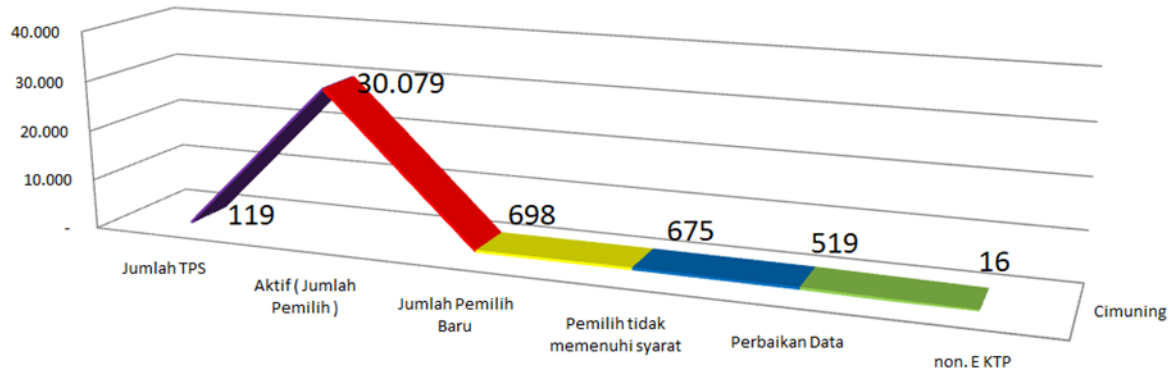
Total Pemilih Baru = 698

Jadi Pemilih Yang Valid = 31.312

Tabel.2 Grafik suara pemilih
Cimuning



Kelurahan Cimuning



Jumlah TPS	Aktif (Jumlah Pemilih)	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih tidak memenuhi syarat	Perbaikan Data	non. E KTP
119	30.079	698	675	519	16

DISKUSI

Manfaat yang diharapkan dari pengabdian masyarakat ini adalah berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah kami lakukan sangat membantu dan bermanfaat sekali sehingga dapat mengembangkan kreatifitas dan inovatif semua peserta PKM yaitu semua pengurus PANTARLIH dari 19 RW yang ada di kelurahan Cimuning. Hala tersebut dikatakan penting karena Pengabdian kepada Masyarakat seperti ini dapat :

- a. Setiap peserta PANTARLIH sangat memahami dan terbantu dengan adanya pengarahan dari para Dosen Universitas Pelita Bangsa
- b. Menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan pengetahuan betapa sangat pentingnya data warga yang akan diperoleh PANTARLIH secara profesional.
- c. Memberikan gambaran upaya untuk dapat memberikan pengarahan kepada warga peserta pemilih yang terdeteksi secara valid maupun secara tidak valid
- d. Peserta PKM dari 19 RW sebagai perwakilan sangat berterima kasih dengan adanya bantuan pengetahuan dari para Dosen Universitas Pelita Bangsa.
- e. Peserta sebagai petugas PANTARLIH bisa bekerja dengan baik, cepat dan tepat dengan waktu yang telah ditentukan oleh PPS kelurahan Cimuning.
- f. Pihak kelurahan juga berharap sekali kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan dengan berbagai macam kegiatan lainnya.

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan ini dianggap sangat bermanfaat bagi seluruh peserta PANTARLIH:

1. Memberikan informasi yang lebih detail tentang apa itu PANTARLIH, dan tugas-tugasnya dapat diselesaikan dengan baik
2. Meningkatkan kepercayaan petugas untuk mendukung kegiatan – kegiatan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan masing-masing RT dalam kekuasaan RW setempat
3. Memudahkan petugas untuk mencari data yang diinginkan dengan sangat mudah



4. Meningkatkan transparansi data pemilih yang sebenarnya
5. Meningkatkan akses informasi bagi masyarakat luas sehingga dapat ditemukan data yang valid , tidak valid serta ada beberapa penambahan pemilih yang memang layak sebagai pemilih

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Berdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengabdian ini dapat dikategorikan berhasil dari segi pelaksanaan dan target yang telah dilaksanakan oleh masing-masing peserta PANTARLIH di setiap petugas di lingkungan RW dalam naungan kelurahan Cimuning.
- b. Peserta pengabdian kepada masyarakat sangat merasa senang dan puas dengan kegiatan ini dan sangat membantu pihak kelurahan Cimuning khususnya untuk peserta PANTARLIH menjadi lebih bervariasi dan inovatif.
- c. Berdasarkan uraian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa partisipasi peserta pengabdian dihadiri oleh 19 RW yang diwakilkan oleh beberapa petugas sebagai PANTARLIH.
- d. Peserta kegiatan ini sangat membantu dari pada petugas PANTARLIH, sehingga dari pihak kelurahan Cimuning sangat antusias sekali agar kegiatan seperti ini dilaksanakan kembali pada periode-periode berikutnya
- e. Kami selaku Dosen Universitas Pelita Bangsa juga mengucapkan terima kasih atas diterimanya kami untuk melaksanakan dan membantu pihak kelurahan Cimuning dalam bidang pengolahan data yang telah dilaksanakan sebagai program Tri Dharma Perguruan Tinggi , diantaranya Pengabdian kepada masyarakat.
- f. Semoga dengan adanya MoU ini kami Universitas Pelita Bangsa siap untuk membantu pihak Kelurahan Cimuning dalam bidang lain.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: Polgov.
- [2] Aspinall, E. (2014). When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, (April 2015), 37–41. <https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706>
- [3] Berenschot, W., & Aspinall, E. (2020). How Clientelism Varies: Comparing Patronage Democracies. *Democratization*, 27(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1645129>
- [4] Bingham Powell, G., & Whitten, G. D. (1993). Midwest Political Science Association Wiley A Cross-National Analysis of Economic Voting: Taking Account of the Political Context Author. Source: *American Journal of Political Science*, 37(2), 391–414.
- [5] Biswas, F. (2022). Electoral patterns and voting behavior of Bihar in Assembly elections from 2010 to 2020: a spatial analysis. *GeoJournal*, (April). <https://doi.org/10.1007/s10708-022-10627-2>
- [6] Boas, T. C. (2015). Voting for Democracy: Campaign Effects in Chile's Democratic Transition. *Latin American Politics and Society*, 57(2), 67–90. <https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2015.00267.x>



- [7] Bornschier, S., Häusermann, S., Zollinger, D., & Colombo, C. (2021). How “Us” and “Them” Relates to Voting Behavior—Social Structure, Social Identities, and Electoral Choice. In *Comparative Political Studies*(Vol. 54). <https://doi.org/10.1177/0010414021997504>
- [8] DeCotiis, T. A., & LeLouarn, J. Y. (1981). A Predictive Study of Voting Behavior in a Representation Election Using Union Instrumentality and Work Perceptions. *Organizational Behavior and Human Performance*, 27(1), 103–118. [https://doi.org/10.1016/0030-5073\(81\)90041-6](https://doi.org/10.1016/0030-5073(81)90041-6)
- [9] Duch, R. M., & Stevenson, R. (2005). Context and the Economic Vote: A Multilevel Analysis. *Political Analysis*, 13(4), 387–409. <https://doi.org/10.1093/pan/mpi028>
- [10] Fairclough, N. (2010). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315834368>
- [11] Fong, B. (2017). In-between Liberal Authoritarianism and Electoral Authoritarianism: Hong Kong’s Democratization Under Chinese Sovereignty, 1997–2016. *Democratization*, 24(4), 724–750. <https://doi.org/10.1080/13510347.2016.1232249>
- [12] Jasiewicz, K. (2009). “The past is never dead”: Identity, class, and voting behavior in contemporary poland. *East European Politics and Societies*, 23(4), 491–508. <https://doi.org/10.1177/0888325409342114>
- [13] Jati, W. R. (2022a). Comparative Analysis of Clientelistic Democracy in India and Indonesia: Outcomes and Challenges. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 7(1).
- [14] Jati, W. R. (2022b). Polarization of Indonesian Society during 2014-2020: Causes and Its Impacts toward Democracy. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 26(2), 152–167.
- [15] Kusnandar, V. B. (2022). Tingkat Partisipasi Pemilu pada Pemilu Legislatif 1955-2019. Retrieved July 11, 2022, from Data Boks Katadata website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-legislatif-1955-2019>
- [16] Leiserowitz, A. (2006). Climate change risk perception and policy preferences: The role of affect, imagery, and values. *Climatic Change*, 77(1–2), 45–72. <https://doi.org/10.1007/s10584-006-9059-9>
- [17] Lembaga Survei Indonesia. (2019). *Laporan Survei Post Election 2019*. Jakarta.
- [18] Loew, N., & Faas, T. (2019). Between Thin-and Host-ideologies: How Populist Attitudes Interact with Policy Preferences in Shaping Voting Behaviour. *Representation*, 55(4), 493–511. <https://doi.org/10.1080/00344893.2019.1643772>
- [19] McAllister, I., Sheppard, J., & Bean, C. (2015). Valence and spatial explanations for voting in the 2013 Australian election. *Australian Journal of Political Science*, 50(2), 330–346. <https://doi.org/10.1080/10361146.2015.1005005>
- [20] McKenzie-Mohr, D., & Schultz, P. W. (2014). Choosing Effective Behavior Change Tools. *Social Marketing Quarterly*, 20(1), 35–46. <https://doi.org/10.1177/1524500413519257>
- [21] Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>
- [22] Muhtadi, B. (2018). Komoditas Demokrasi: Efek Sistem Pemilu terhadap Maraknya Jual Beli Suara. In *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*(pp. 95–117). Jakarta: Bawaslu RI.



- [23] Mutz, D. C. (2013). The Consequences of Cross-Cutting Networks for Political Participation. *American Journal of Political Science*, 46(4), 838–855. <https://doi.org/10.2307/3088437>
- [24] Pahlevi, M. E. T., Khalyubi, W., & Khatami, M. I. (2021). Persepsi Pemilih Milenial Dalam Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2), 99–114. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.11>
- [25] Pastor, R. A. (1999). The role of electoral administration in democratic transitions: Implications for policy and research. *Democratization*, 6(4), 1–27. <https://doi.org/10.1080/13510349908403630>
- [26] Pusat Penelitian Politik -LIPI. (2014). Laporan Akhir Survei Nasional 2014: Partisipasi Politik dan Partisipasi Pemilih. Jakarta.
- [27] Raymond, C. D., & Worth, R. M. (2017). Explaining voting behaviour on free votes: Solely a matter of preference? *British Politics*, 12(4), 555–564. <https://doi.org/10.1057/s41293-016-0023-7>
- [28] Rohendi, R., & Muzzamil, F. (2021). Tipologi Pemilih Pemula pada Pilkada Jabar 2018: Studi tentang Tipe Pemilih dari Kalangan Remaja di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(1), 46–65. <https://doi.org/10.55108/jap.v4i1.46>
- [29] Rumah Pemilu. (2014). Money Politic Hantui Pileg. Retrieved July 24, 2022, from Rumah Pemilu website: <http://www.pemilu.com/berita/2014/03/money-politics-hantui-pileg-2014>